KUNJUNGI KPU PAREPARE, OMBUDSMAN SULSEL DORONG ISU PELAYANAN PUBLIK JADI MATERI DEBAT CAKADA

Jum'at, 16 Maret 2018 - Indra

Parepare, PANRITA.News - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga Negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada Kamis (15/03/2018).

Dalam kunjungan tersebut, secara khusus Ombudsman Sulsel meminta kepada KPU Parepare agar isu-isu pelayanan publik dijadikan sebagai salah satu materi pada debat Cakada Walikota Parepare yang nantinya akan digelar oleh KPU.

Pentingnya mengangkat isu pelayanan publik sebagai salah satu materi debat agar masyarakat dapat mengetahui sejauhmana komitmen para kandidat kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat jika terpilih nantinya.

Jadi, secara khusus kedatangan kami ke KPU Parepare adalah untuk berkoordinasi terkait isu-isu pelayanan publik agar supaya menjadi salah satu materi debat, dan sekaligus untuk bersilaturrahim dengan teman-teman KPU. Ujar Muslimin B. Putra, Koordinator Bidang Pencegahan Ombudsman Sulsel.

Muslimin menambahkan, bahwa selain mendorong isu pelayanan publik menjadi salah satu materi debat, kunjungan Ombudsman Sulsel juga untuk memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan pemilukada yang telah dijamin oleh konstitusi.

Dan, Alhamdulillah kami sudah mendengar langsung komitmen dan jaminan dari Ibu Ketua KPU.

Pada pertemuan tersebut, Ketua KPU, Nur Nahdiyah juga memaparkan pelbagai upaya yang telah dilakukan oleh teman-teman di KPU Parepare dalam menjamin terpenuhinya seluruh hak-hak masyarakat, termasuk tantangan yang dihadapi oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di lapangan dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang cukup beragama dan membutuhkan pola penanganan yang berbeda-beda.

Sebelum mengunjungi Kantor KPU Parepare, Tim Ombudsman Sulsel juga menyambangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare dalam rangka penyelesaian laporan masyarakat terkait dugaan alih fungsi jalan menjadi pasar (pasar senggol).